MODAL SOSIAL DAN KEBERLANJUTAN USAHA KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PROGRAM DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT DI KALIMANTAN SELATAN

Social Capital and the Sustainability of Community Group Enterprises in the Peatland Care Independent Village Program in South Kalimantan

Rina Muhayah Noor Pitri[1], Kissinger[1], dan Gusti Muhammad Hatta[1]
[1]Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan

***ABSTRACT**. Community based peatland ecosystem restoration activities are implemented by involving local communities across various age groups and genders. The development of community group enterprises constitutes a key component of the economic revitalization program aimed at achieving peatland ecosystem restoration goals. This study aims to analyze social capital and the sustainability of community group enterprises. The research was conducted in two villages, namely Marampiau Village in Tapin Regency and Awang Village in Hulu Sungai Tengah Regency. Respondents were selected using purposive sampling, consisting of members of community enterprises, community facilitators (FM), and the Coordinator of Community Facilitators (KFM). The total number of respondents in this study was 24 individuals. The analysis of social capital covered elements such as trust, proactive actions, coordination, cooperation, information flow, and institutional aspects. Focus Group Discussions (FGDs) were employed as the analytical method to identify key indicators determining the success of community group enterprises. The results show that the level of social capital in Marampiau Village is high, while in Awang Village it is moderate. Community group enterprises in Marampiau Village, Tapin Regency, have remained sustainable up to the third year of the Peatland Care Independent Village Program implementation. In contrast, community group enterprises in Awang Village were only sustained for two years during the program period. Weaknesses in social capital were identified as a major factor hindering the sustainability of community enterprises in Awang Village. These findings indicate the significant role of social capital as a key factor supporting*

Keywords: peatland ecosystem, sustainability, social capital, community group enterprises*the sustainability of community-based enterprises.*

ABSTRAK. Kegiatan pemulihan ekosistem gambut berbasis masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dari berbagai segmen usia dan jenis kelamin. Pengembangan usaha kelompok masyarakat menjadi salah satu bagian dari program revitalisasi ekonomi untuk mencapai tujuan pemulihan ekosistem gambut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modal sosial dan keberlanjutan Usaha Kelompok Masyarakat. Lokasi penelitian berada pada 2 desa yaitu Desa Marampiau di Kabupaten Tapin dan Desa Awang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Responden dipilih secara *purposive sampling* yaitu anggota usaha kelompok, Fasilitator masyarakat (FM) dan Koordinator Fasilitator Masyarakat (KFM). Total jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 24 orang. Analisis modal sosial meliputi unsur kepercayan, tindakan proaktif, koordinasi, kerjasama, arus informasi dan kelembagaan. Focus Group Discusion (FGD) menjadi metode analisis dalam menentukan berbagai indikator yang menentukan dalam keberhasilan usaha kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa modal sosial masyarakat desa Marampiau adalah tinggi dan desa Awang adalah sedang. Usaha kelompok masyarakat Desa Marampiau Kabupaten Tapin masih tetap bertahan hingga tahun ketiga dari pelaksanaan Program Desa Mandiri Peduli Gambut, sedangkan usaha kelompok desa Awang hanya bertahan selama 2 tahun mengikuti program Desa Mandiri Peduli Gambut. Kelemahan dalam modal sosial menjadi pemicu terhambatnya keberlanjutan usaha kelompok masyarakat di desa Awang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bagaiamana peran modal sosial sebagai salah satu faktor yang mendukung keberlanjutan usaha kelompok masyarakat.

Kata kunci: ekosistem gambut, keberlanjutan, modal sosial, usaha kelompok Masyarakat

Penulis untuk korespondensi, surel: rina.muhayah@ulm.ac.id

PENDAHULUAN

Degradasi ekosistem gambut di Indonesia terutama disebabkan oleh berbagai kegiatan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan karakteristik ekosistem gambut. Gambut. Indonesia memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut secara berkelanjutan. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), pemulihan fungsi hidrologis Ekosistem Gambut dilaksanakan baik di areal konsesi maupun areal non konsesi (masyarakat). KLH mendorong dan melibatkan peran aktif masyarakat dan pihak swasta untuk melakukan pemulihan ekosistem gambut di areal konsensi maupun lahan masyarakat.

Salah satu prinsip dasar dalam pemulihan Ekosistem Gambut adalah *Improve Local Communities Livelihood* untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (KLHK. 2021). Kegiatan pemulihan ekosistem gambut berbasis masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat (pria maupun wanita), dari berbagai segmen usia, turut aktif dalam pemulihan ekosistem gambut. Masyarakat dikenalkan pada berbagai aspek perlindungan ekosistem gambut dan didorong untuk beralih kepada perilaku yang ramah ekosistem gambut. Pengelolaan ekosistem gambut berdasarkan regulasi yang berlaku adalah berbasis pada Kesatuan Hirologis Gambut (KHG). KHG adalah suatu kesatuan ekosistem gambut yang letaknya ada di antara dua sungai, sungai dan laut, genangan, dan pada rawa (KLHK 2022).

Berdasarkan Kepmen LHK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional. Kalimantan Selatan memiliki 4 KHG yaitu KHG Sungai Balangan-Sungai Batangalai, KHG Sungai Barito-Sungai Taping, KHG Sungai Utar-Sungai Serapat, dan KHG KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura.

Dua desa yang termasuk dalam wilayah kesatuan hidrologis di Kalimantan Selatan adalah Desa Marampiau Kabupaten Tapin dan Desa Awang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kedua desa ini telah melakukan kegiatan usaha kelompok selama 2 tahun (2023-2024). Kedua desa terpilih mengikuti Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG). Salah satu bentuk kegiatan dalam program DMPG adalah pengembangan usaha kelompok masyarakat. Pelaksanaan usaha kelompok diduga belum berjalan dengan optimal. Kegiatan usaha kelompok masyarakat seringkali memperoleh tantangan terutama mengenai keberlanjutan usaha.

Hasil pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa kegiatan usaha kelompok dalam program DMPG berjalan sesuai rencana tetapi terdapat beberapa kendala dalam keberlanjutan usaha usaha kelompok tersebut. Kendala yang dialami masyarakat belum teridentifikasi dengan baik sehingga belum dapat memberikan solusi yang berdasarkan pada masalah spesifik dalam kelompok masyarakat. Penelitian ini berupaya menganalisis modal sosial masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha kelompok masyarakat dan keberlanjutan usaha kelompok masyarakat dalam Program Desa Mandiri Peduli Gambut.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan selama 6 bulan yang meliputi pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, pembuatan laporan penelitian dan pembuatan artikel jurnal. Lokasi penelitian adalah Desa Marampiau Kecamatan Candilaras Selatan Kabupaten Tapin dan Desa Awang Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Obyek, Peralatan Penelitian

Obyek penelitian adalah para anggota kelompok usaha Program Desa Peduli Gambut sebanyak 20 orang yang tergabung dalam Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TKPPEG), tenaga pendamping (fasilitator) masyarakat sebanyak 4 orang. Peralatan penelitian berupa peralatan tulis menulis, daftar pertanyaan, peralatan dokumentasi dan seperangkat komputer untuk pengolahan data.

Prosedur Pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan metode wawancara semi terstruktur untuk mengumpulkan data modal sosial. Jumlah responden yang digunakan dalam pengumpulan data sebanyak 24 orang.

Analisis Data

Kategori modal sosial masyarakat dianalisis menggunakan unsur modal sosial berdasarkan 6 unsur modal sosial.. Unsur dan indikator dalam modal sosial yang digunakan yaitu i) Kepercayaan; ii) Tindakan Proaktif; iii) Koordinasi; iv) Kerjasama; v) Arus Informasi; vi) Kelembagaan.

Tabel 1. Unsur dan indikator modal sosial

Ukuran/indikator modal sosial
1) Unsur Kepercayaan dengan indikator: a) Fasilitator Masyarakat, b) Ketua, c) Sekertaris, d) Bendahara, e) Anggota kelompok, f) Lembaga pendamping, g) Penggunaan dana kelompok.
2) Tindakan proaktif Keaktifan dalam menyelesaikan laporan kelompok, berbagi pengetahuan/pengalaman, partisipasi kegiatan revitalisasi gambut, keaktifan menyelesaikan masalah, tindakan menjaga eksosistem gambut.
3) Koordinasi dengan indikator: pertemuan formal dan non formal untuk koordinasi di desa sendiri dan di desa lainnya.
4) Kerjasama Indikator kerjasama dalam kelompok berupa kerjasama dalam memberikan pakan, memelihara ternak, mejaga kesehatan ternak, kerjasama menjaga gambut, kerjasama dalam organisasi, Indikator kerjasama antar anggota dengan warga desa lainnya, kerjasama dengan kelompok dari desa lainnya, dan kerjasama dalam mengatasi masalah kelompok.
5) Arus Informasi Indikator: melakukan komunikasi, kemudahan berkomunikasi jarak jauh, kemudahan memperoleh informasi, sarana memperoleh informasi, keterbukaan menerima dan berbagi informasi, kerelaan melakukan sosialisasi, keinginan saling mengunjungi dalam rangka mencari informasi, keterbukaan berbagi dan menerima informasi dengan pihak luar.
6) Kelembagaan Indikator: Keabsahan pembentukan kelompok, inisiatif pembentukan kelompok, kejelasan struktur organisasi, pembagian kerja kelompok dan adanya Peraturan dalam kelompok.

Kategori tingkatan modal sosial dianalisis melalui berdasarkan skor selang nilai modal sosial seperti tertera dalam Tabel 2 berikut

Tabel 2. Selang nilai Modal sosial

Tingkat	Skor
Minimum	≥ 41 – 71,75
Rendah	>71,75 – 102,5
Sedang	>102,5 – 133,25
Tinggi	>133,25 - 164

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kategori modal sosial masyarakat yang menjadi anggota Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TK-PPEG) antara kedua desa pelaksana program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3. Kategori Modal Sosial Masyarakat

No.	Unsur	Tingkat Modal Sosial	
		Desa Marampiau	**Desa Awang**
1	Kepercayaan	Tinggi	Sedang
2	Tindakan Proaktif	Tinggi	Sedang
3	Koordinasi	Tinggi	Sedang
4	Kerjasama	Tinggi	Tinggi
5	Arus informasi	Sedang	Sedang
6	Kelembagaan	Sedang	Sedang
	Tingkat Modal Sosial	**Tinggi**	**Sedang**

Kerjasama merupakan unsur modal sosial yang memiliki nilai tinggi untuk kedua desa. Kerjasama juga terindikasi tinggi sebagai bentuk pola yang umum terjadi di masyarakat perdesaan. Kerjasama dalam kelompok tercermin dalam pemberian pakan, pemeliharaan ternak, mejaga kesehatan ternak, kerjasama menjaga gambut, kerjasama dalam organisasi. Kerjasama yang terbentuk tidak hanya dengan sesame anggota, tetapi juga dengan warga lain, anggota kelompok lain dari desa yang berbeda.

Kerjasama merupakan salah satu unsur yang akan membentuk kapasistas adaptif komponen masyarakat. Kapasitas adaptasi merupakan bentuk fleksibilitas dalam menjaga keberlangsungan suatu program atau kegiatan yang sedang berlangsung. kapasitas adaptasi ini menjadi sebuah daya dukung dalam menghadapi perubahan sosial (Farchan. 2019).

Kategori modal sosial desa Marampiau Kabupaten Tapin lebih tinggi dibandingkan dengan desa Awang Kabupaten Hulu Simgai Tengah. Perbedaan unsur modal sosial terletak pada unsur kepercayaan, tindakan proaktif dan koordinasi.

Kepercayaan menjadi modal sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kepercayaan yang terbentuk tidak sekedar di antara anggota kelompok, tetapi juga kepercayaan anggota kelompok terhadap fasilitator masyarakat dan tim pendamping. Transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi pemicu dalam tingkat kepercayaan yang ada. Kepercayaan mendorong terbentuknya kerjasama yang baik. Kepercayaan merupakan unsur modal sosial yang menguatkan masyarakat dalam pembangunan (Melia *et al*. 2022). Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi memiliki peluang mencapai kemakmuran lebih tinggi dibandingkan mayarakat dengan tingkat kepercayaan rendah (Fukuyama, 2007).Tindakan proaktif terindikasi dari keaktifan anggota kelompok dalam menyelesaikan dokumen, berbagi pengetahuan/pengalaman, keaktifan menyelesaikan masalah, partisipasi kegiatan revitalisasi gambut, tindakan menjaga ekosistem gambut. Kasus penyelesaian dokumen antara kedua desa termasuk baik. Indikator yang berbeda terletak pada berbagi pengetahuan/pengalaman dan keaktifan menyelesaikan masalah. Karakteristik individu antar anggota TKPPEG Desa Marampiau yang relative sama terutama dalam keterbatasan penguasaan teknologi tentang ternak sapi, tetapi memiliki keinginan yang kuat untuk berhasil melaksanakan program menjadi pendorong munculnya tindakan proaktif dalam kegiatan berbagi pengalaman dan menyelesaikan masalah. Sementara itu kondisi anggota di desa Awang Sebagian kecil ada yang menguasai budidaya kambing, sementara sebagian besar tidak memiliki penguasaan pengetahuan tentang ternak kambing. Fenomena ini mendorong hanya sebagian anggota saja memiliki sifat proaktif, sedangkan anggota lainnya hanya sekedar mengikuti kegiatan sebagai kebiasaan saja.

Kepribadian proaktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kerja inovatif (Firdaus dan Handoyo. 2021). Perilaku proaktif akan meningkatkan efektifitas individu dan organisasi atau kelompok. Peran tindakan

proaktif dalam kelompok sangat menting dalam mendorong inisiatif, meningkatkan tanggung jawab dan mendorong pemecahan masalah secara mandiri untuk mencapai tujuan organisasi (Yalçınyiğit and Karaçay. 2025).

Koordinasi terindikasi dari pertemuan formal dan non formal untuk koordinasi di desa sendiri dan di desa lainnya. Kerjasama dalam kelompok tercermin dari tingkat kehadiran dalam berbagai kordinasi ≥ 80% dari anggota kelompok. Ketidakhadiran biasanya muncul akibat ada kegiatan mendesak (*urgent*) atau dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Desa Marampiau dalam pelaksanaan kegiatan usaha ternak sapi lebih sering mengadakan pertemuan informal dalam pengelolaan ternak. Kordinasi tidak hanya dengan anggota kelompok, tetapi juga dengan warga lain dalam dan luar desa yang memiliki pengalaman dalam beternak sapi. Kelompok ini cukup berhasil dalam mencegah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) melalui kodinasi dengan peternak dari desa lain. Kordinasi menuntut satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri agar anggota atau satuan organisasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi merupakan salah satu alat utama bagi organisasi untuk mempercepat proses pencapaiaan tujuan. koordinasi merupakan susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama (Manoppo *et al*. 2017)

Permasalahan yang terjadi di kedua desa dalam unsur modal sosial umumnya terkait dengan arus informasi dan kelembagaan. Arus informasi diindikasikan melalui: kegiatan komunikasi, kemudahan berkomunikasi jarak jauh, kemudahan memperoleh informasi, sarana memperoleh informasi, keterbukaan menerima dan berbagi informasi, kerelaan melakukan sosialisasi, keinginan saling mengunjungi dalam rangka mencari informasi, keterbukaan berbagi dan menerima informasi dengan pihak luar. Beberapa unsur modal sosial arus informasi tentang kemudahan berkomunikasi jarak jaun (media *online*), keinginan mengunjungi dalam rangka mencari informasi, keterbukaan menerima dan berbagi informasi dengan sesame anggota kelompok, keterbukaan menerima informasi dari pihak luar mengalami peningkatan untuk kedua kelompok usaha masyarakat. Hanya saja indikator lainnya seperti berkomunikasi, kemudahan memperoleh informasi, keterbukaan berbagi dengan pihak luar serta kerelaan melakukan sosialisasi masih relative terbatas sebagai dampak dari kapasitas sumberdaya manusia dalam berkomunikasi dan penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Kepercayaan diri juga masih belum terbentuk pada anggota kelompok, sehingga menjadi penghambat dalam arus informasi.

Kelembagaan merupakan sistem sosial yang berisikan aturan main (*rules of the game*) baik formal (produk hukum atau kebijakan) maupun informal (norma, kebiasaan, nilai) yang sifatnya mengikat, mengatur perilaku, dan interaksi manusia untuk mencapai tujuan bersama secara stabil. Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut berdasarkan perspektif kelembagaan adalah organisasi resmi yang ditetapkan dengan SK Kepala Desa setempat. Tiap anggota kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan usaha yang dikembangkan.

Usaha kelompok yang dikembangkan oleh kedua kelompok ini relative baru, sehingga aturan main baik secara formal sangat bergantung pada kebijakan pemberi dana program. Aturan main informal (norma, kebiasan, nilai) tentang usaha kelompok yang dilakukan masih dalam tahap pengembangan, sehingga secara kelembagaan relative belum kuat. Kelompok usaha baru relative belum norma kebersamaan (timbal balik) yang kuat dalam mempertahankan kepentingan bersama. Menjadi permasalahan umum bagi kelompok baru belum dapat mengutamakan kepentingan bersama. Para anggota kelompok usaha belum dapat melihat keuntungan jangka panjang dari aset bersama yang dimiliki kelompok. Aset kelompok dianggap sebagai kekayaan yang sesegeranya dapat dibagi-bagi, dijual dan dapat diuangkan secepatnya untuk kepentingan pribadi. Lemahnya visi bersama dalam menterjemahkan aset kelompok, kepercayaan yang kurang menyebabkan modal sosial pengikat (*bonding social capital*)

Kelembagaan merupakan salah satu jaminan yang dapat mendukung keberhasilan usaha kelompok. Penguatan kelembagaan melalui regulasi, akses pembiayaan, pelatihan, transparansi pengelolaan pendanaan serta jaringan usaha menjadi prioritas utama dalam pengembangan usaha (Widowati *et al*. 2022)

Berdasarkan kategori modal sosial yang tertera dalam Tabel 3, desa Marampiau Kabupaten Tapin memiliki peluang lebih tinggi

dibandingkan Desa Awang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam keberhasilan pengembangan usaha kelompok. Hasil identifikasi terbaru membuktikan bahwa Kelompok TKPPEG Desa Marampiau masih melanjutkan program Desa Mandiri tahun ketiga dengan fokus usaha kelompok pada peternakan sapi.

Desa Awang tidak memperluas keanggotaan dalam kelompok usaha bagi masyarakat desa lainnya, sehingga memutuskan tidak melanjutkan program pendanaan DMPG pada tahun 2025. Anggota kelompok desa Awang yang masih bertahan mempertahankan aset untuk terus dikembangkan dan tidak dijual hanya 2 orang (Ketua kelompok dan 1 orang anggota kelompok). Sementara sebagian besar anggota kelompok lainnya menuntut agar aset kelompok dibagi-bagi dan dijual untuk kepentingan pribadi. Lemahnya visi bersama dalam menterjemahkan aset kelompok, kepercayaan yang kurang menyebabkan modal sosial pengikat (*bonding social capital*) menjadi lemah. Berbagai kelemahan dalam unsur modal sosial yang ada menjadi pendorong tidak dilanjutkannya program DMPG pada desa Awang Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Modal sosial yang terbentuk dalam kelompok usaha masyarakat program DMPG (Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) terdiri dari berbagai unsur modal sosial seperti kepercayaan, tindakan proaktif, koordinasi, kerjasama, arus informasi dan kelembagaan. Peran modal sosial dalam penelitian ini menjadi sangat penting sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan keberlanjutan usaha kelompok. Modal sosial bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha kelompok, tetapi secara bersama-sama dengan faktor lainnya menentukan keberhasilan program DMPG. Diperlukan penelitian dalam perspektif lain untuk menguatkan pendekatan sosial dalam menunjang keberhasilan progam DMPG.

DAFTAR PUSTAKA

Farchan Yusa. 2019. Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Industri di Desa Gemulung Kabupaten Jepara. *Jurnal Renaissance*. Vol. 4 (01): 504-513

Firdaus MS., dan Handoyo S. 2021. Pengaruh Kepribadian Proaktif dan Budaya Organisasi terhadap Perilaku Kerja Inovatif Pelaku Industri Pariwisata Jawa TimurBuletin Penelitian Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM), 2021, Vol. 1(2), 1468-1477

Fukuyama F. 2007. Trust: The Sosial Virtues And The Creation 0f Prosperity. Newyork: Free Press.

Hasbullah J. Sosial Kapital: Menuju keunggulan budaya manusia Indonesia. Jakarta: MR-United Press; 2006. 1–169 p.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2021. Kerangka Acuan Kerja Pembentukan Kemandirian Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan 2021. Jakarta: KLHK; 2021. 1–12 p

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutaan. 2022. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2022.

Manoppo IRA., Mantiri M., Sambiran S. 2017. Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan. Eksekutif. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol. 2 (2).

Melia A., Roslinda E., Prayogo H. 2022. Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Tembawang di Desa Paloan. *Jurnal Tengkawang*. Vol. 12 (1): 1–29.

Pitri RMN. 2023. Pemulihan ekosistem gambut berdasarkan modal sosial masyarakat. [Indonesia]: Universitas Lambung Mangkurat.

Pitri RMN, Hatta GM, Kurnain A, Hafizinor, Kissinger. 2023. Social Capital in the Restoration of Peatland Ecosystems: A Case Study of Pulantani Village, South Kalimantan, Indonesia. *Russ J Agric Socioecon Sci*. 25 de abril de

2023;136(4):126–33

Widowati I, Rini WDE., Utami HH., Karyono, Asyragi AL., Zahra AS., Sofitaria A., Dishatama GA. 2025. Pentingnya Kelembagaan dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Forkom Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman. *Prosiding Seminar Pengabdian Masyarakat LPPM UVN Veteran Yogyakarta*. ISSN: 3109 7839.

Yalçınyiğit, S., Karaçay, G. A glimpse into employee proactive behavior: the followership perspective. Curr Psychol44, 13037–13061 (2025). https://doi.org/10.1007/s12144-025-08048-8